

# MENGHADIRKAN RUANG BAGI BURUH PEREMPUAN DALAM STUDI SEJARAH INDONESIA

**F. X. Domini B. B. Hera**

Peneliti di Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, LPPM, Universitas Brawijaya

**Abstrak:** penulisan posisi buruh perempuan dalam studi sejarah Indonesia memiliki tantangan yang serius. Pertama, wacana buruh dilarang oleh Orde Baru karena dianggap kiri. Kedua, buruh perempuan hilang dari peredaran kajian sejarah Indonesia secara signifikan oleh karena faktor pertama. Ketiga, sulit menemukan sumber sejarah seperti arsip yang khusus menghasilkan dokumen buruh perempuan. Kerangka metode sejarah dipakai untuk merangkai beberapa data terkait. Tulisan kesejarahan buruh perempuan ini dihadirkan dengan semangat masa-masa yang menarik dalam sejarah Indonesia. Hal ini dengan guna ilmu sejarah dalam usahanya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan kemajemukan budaya dan nilai hidup melalui alam demokrasi yang sehat.

**Kata-kata kunci :** buruh, buruh perempuan, sejarah Indonesia

**Abstract:** *the writing of labour position in the study of Indonesian history faces a serious challenge. First, the labour discourse is banned by the New Order because it is claimed as the left. Second, the woman labour is rarely as a focus of Indonesian history study that is caused by the first factor. Third, it is difficult to find the primary sources like the specific archives of woman labour. This study used the historical method. This article of labour women history is showed by the spirit of the interesting period in the Indonesian history. This is related by the aim of history in order to fill the need of Indonesian society for the multicultural society and the values of life in the context of well shaped democracy.*

**Keywords:** *labour, woman labour, Indonesian History*

Narasi resmi sejarah Orde Baru meniadakan peran perjuangan kaum buruh dalam kemerdekaan Indonesia. Militer begitu dominan dalam buku putih sejarah yang diterbitkan negara kala rezim otoritarian tersebut berkuasa dan dalam serangkaian pelajaran sejarah yang disampaikan di berbagai tingkat satuan pendidikan. Buruh dan segala wacana yang mengikutinya dinilai ‘kekiri-kirian’, sehingga perlu dijinakkan. Bentuk salah satu penjinakkan dari segala hal yang berkaitan dengan buruh adalah mengubah kata ‘buruh’ menjadi ‘karyawan’. Hal ini merupakan kemenangan ideologis Orde Baru dalam membungkam wacana kritis diskursus buruh Indonesia. Persoalan buruh kembali mengemuka saat pembunuhan buruh pabrik wanita pada tahun 1993 bernama Marsinah (lahir tahun 1969).

Marsinah menjadi ikon legendaris buruh pada paruh akhir dan pasca Orde Baru. Rezim itu tidak akan menduga bahwa isu pembunuhan buruh wanita Marsinah akan menjadi sorotan internasional. Aparatur Orde Baru juga tidak akan menduga bahwa seorang buruh perempuan seperti Marsinah sempat akan menggugat ke pengadilan. Marsinah berjam-jam di rumahnya mengumpulkan klipng koran, belajar tentang sidang pengadilan, berdiskusi hingga ia tahu bahwa ia bisa menggugat perusahaan yang bersikap sewenang-wenang terhadap buruhnya. Peranan media besar dalam memuat pemberitaan seputar Marsinah (Heryanto, 2001: 296-297).

Keterbatasan pembahasan sejarah buruh dalam narasi besar di Indonesia diperparah dengan ketiadaan suara buruh wanita yang muncul dalam

narasi sejarah buruh itu sendiri. Mayoritas publikasi seputar buruh membahas aspek sosial dan politik. Buruh wanita hanya muncul dalam data-data statistik (De Steurs, 2008: 249-251). Sosiolog hukum terkemuka Indonesia, Soetandyo Wignjosebroto (1932-2013) senantiasa mengingatkan bahwa manusia tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk angka-angka. Menerjemahkan buruh wanita dari statistik tersebut dalam narasi sejarah adalah sebuah keniscayaan dari studi sejarah perempuan. Kajian sejarah perempuan pada tema buruh begitu minim, mengingat sejarah buruh sendiri oleh Orde Baru tidak disinggung.

### **BURUH PEREMPUAN SEBAGAI KEKUATAN YANG TERHEMPAS**

Gerakan buruh di Indonesia sempat menjadi primadona pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan (Hadiz, 1994: 77-79). Selama pemerintahan kolonial Belanda, kesempatan perempuan untuk memperoleh pekerjaan terhambat baik secara vertikal maupun horizontal. Selama pendudukan Jepang, kurangnya keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi memaksa perempuan menjadi tulang punggung keluarga karena lelaki dimanfaatkan sebagai romusha. Kaum perempuan harus melakukan berbagai pekerjaan yang tidak pernah mereka kerjakan sebelumnya. Berkat pengalaman itu kalangan perempuan menjadi sadar bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan banyak pekerjaan untuk menyambung hidup keluarga.

Setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya, kondisi sosial yang berkembang membuat kesempatan bekerja bagi perempuan menjadi besar. Kehidupan yang begitu keras memaksa mereka untuk cerdas memanfaatkan berbagai kesempatan. Selama revolusi, perempuan adalah penolong penting dengan tugas yang penting, termasuk menjadi menteri. Setelah kondisi telah kondusif, perempuan menjadi pesaing di mata lelaki, bahkan tidak sedikit perempuan ditakuti karena perempuan dapat mengatur persoalan publik dan pribadi mereka sendiri (Kedaulatan Rakyat, 1951:

7). Hingar bingar berbagai organisasi buruh pada dekade 1950-an hingga paruh awal 1960-an adalah studi menarik tersendiri. Peristiwa 1 Oktober 1965 mengubah keindonesiaan termasuk buruh.

Selama Orde Baru, gerakan buruh harus bermain di bawah tanah. Saat gelombang reformasi datang, gerakan buruh pun absen dan tidak berkesempatan tampil sebagai unsur pemenang seperti mahasiswa. Reformasi ini membawa dampak yang baik sebagai momentum konsolidasi perempuan dalam buruh. Beberapa lembaga studi ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) mulai memperhatikan buruh wanita. Semisal Yayasan Jurnal Perempuan (dalam Hera, 2014: 13) mempublikasikan kehidupan buruh wanita pembatik. Reformasi sebagai angin segar baru pasca pemerintahan totaliter membawa dampak yang baik bagi gerakan perempuan dan buruh perempuan (Budianta, 2004: 322-330).

### **SENTUHAN WANITA DALAM GERAKAN BURUH INDONESIA**

Gerakan buruh telah ada pada masa Pra-Indonesia, tepatnya pada masa kolonial. Usia gerakan buruh sama dengan usia nasionalisme Indonesia sendiri. Kekuatan buruh yang dimobilisasi untuk kepentingan kontra penjajahan Belanda begitu masif dilakukan. Pemogokan demi pemogokan terjadi. Kemunculan tokoh seperti Semaoen (1899-1971), F. H. M. Sneevliet (1883-1942), Iwa Kusuma Sumantri (1899-1971), dan Surjopranoto (1871-1959) sebagai pelopor gerakan buruh sangat diperhitungkan baik oleh pemerintah kolonial maupun aktivis pergerakan kala itu. Selama pendudukan Jepang, gerakan buruh yang hiruk pikuk seperti era kolonial dipotong habis. Pengerahan massal pada sektor kerja paksa ala Jepang bernama Romusha terjadi. Kebijakan tersebut tidak lepas dari strategi Soekarno meraih simpatik Jepang pada masa Perang Dunia II.

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga akhir revolusi fisik tahun 1949 memberikan porsi besar buruh dalam pentas nasional. Pasca

proklamasi, serikat buruh mulai bermunculan kembali untuk merampas kekuasaan dari Jepang dan membentuk negara merdeka. Kemerdekaan memberi harapan bagi kalangan buruh untuk mendapatkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak mogok, hak berdemonstrasi, dan kesempatan memperbaiki taraf kehidupan. Kedudukan serikat buruh di Indonesia semakin kuat saat SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) diberi 40 kursi di KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) oleh pemerintah pada tahun 1945 dan Indonesia masuk ke dalam keanggotaan PBB tahun 1950 (Madjid, 1953).

Surastris Karma Trimurti (1912–2008) adalah salah satu figur vital dalam memobilisasi buruh perempuan dalam revolusi Indonesia. Posisi vital buruh saat awal kemerdekaan ialah merebut secara cepat berbagai pabrik, kantor, pertanian, perkebunan, perusahaan yang dahulu dimiliki musuh (mereka yang dianggap penjajah seperti Belanda maupun Jepang). Setelah pengambil-alihan tersebut maka semua inventarisir tersebut menjadi milik Republik Indonesia. Trimurti menjelaskan bahwa buruh adalah pelaksana yang efektif dalam kegiatan pengambil-alihan tersebut karena mereka berada di mana-mana sepanjang sektor-sektor yang diambil tersebut berada (Trimurti, 1986: 118-119). Hal ini sesuai dengan semangat Proklamasi Indonesia tahun 1945, “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan dengan cara seksama.”

Trimurti selaku aktivis pergerakan turut mendirikan Partai Buruh Indonesia pada tahun 1946 setelah terbitnya Maklumat X Wakil Presiden Mohammad Hatta (1902-1980) tahun 1945 mengenai pendirian partai-partai. Kalangan buruh perempuan mendirikan Barisan Boeroeh Wanita yang diketuai oleh Trimurti. Kegiatan organisasi ini ditujukan untuk memberi pendidikan dan kesadaran pada kaum buruh perempuan, khususnya arti penting persatuan. Pada tanggal 1 Mei 1946 (Perayaan Hari Kemenangan Buruh), BBW

telah berhasil mengumpulkan calon pemimpin buruh perempuan untuk dilatih selama dua bulan.

Trimurti selanjutnya menjadi Menteri Perburuhan pertama (kini bernenklatur Kementerian Tenaga Kerja) pada kabinet Perdana Menteri Amir Sjarifuddin (1907-1948) sepanjang tahun 1947-1948. Agenda kerja pemerintah saat itu adalah mencegah masuknya kembali Belanda ke wilayah Republik Indonesia, tetapi menteri buruh ini berhasil mengesahkan Undang-undang kecelakaan kerja no 33 tahun 1947. Undang-undang tenaga kerja ini memuat hal-hal yang progresif untuk jaman itu yaitu pasal-pasal yang mengatur tenaga kerja wanita. Di antaranya: wanita tak diperbolehkan diperkerjakan pada malam hari kecuali pekerjaannya mensyaratkan demikian seperti bidan dan perawat. Menjaga tenaga kerja perempuan dari pelecehan seksual serta menjamin hak cuti 3 bulan bagi tenaga kerja yang hamil dan akan melahirkan. Penghargaan bagi tenaga kerja perempuan yang masih harus terus diperjuangkan implementasinya hingga saat ini.

## **PEREMPUAN DAN PILIHAN PROFESI**

Setelah Indonesia merdeka, perempuan yang bekerja dapat dibagi menjadi empat kategori, pertama perempuan yang bekerja secara bebas (dokter dan pengacara). Kedua, perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ketiga, pedagang kecil atau bekerja di industri rumah tangga. Keempat, buruh perempuan yang bekerja di perusahaan swasta termasuk pekerja rumah tangga serta tenaga lapangan. Bagi mereka yang terklasifikasi dalam tipe pertama ialah tenaga terlatih dan bebas secara ekonomi sedangkan mereka yang ada di tipe ketiga mereka adalah pekerja di sektor yang rentan. Perusahaan-perusahaan swasta terus dipaksa oleh serikat buruh untuk memberikan perlakuan yang sama bagi para pekerjanya.

Jumlah perempuan yang melamar di bursa tenaga kerja memperlihatkan bahwa kaum perempuan lebih berjiwa mandiri dan menunjukkan

tata cara perubahan cara pandang masyarakat terhadap buruh perempuan. Djawatan Penempatan Tenaga telah mengumpulkan berbagai gambaran dari berbagai bursa tenaga kerja pada tahun 1956 yang menunjukkan jumlah pelamar sebanyak 23.914 perempuan dan 218.289 lelaki. Pada akhirnya yang mendapatkan pekerjaan 4.812 perempuan dan 26.998 lelaki. Di lapangan, persamaan

perlakuan antara buruh perempuan dan lelaki sangat timpang. Ketika ada seorang perempuan dan lelaki melamar pekerjaan kemungkinan besar lelaki yang dipilih dibanding perempuan. Pandangan perempuan lemah dan rendah sangat mengemuka di zaman itu, bahkan sesudah RA Kartini (1879-1904) lama meninggal.



**Gambar 1. Pencatatan kemampuan dan keahlian para perempuan oleh petugas Jawatan Penempatan Kerja Propinsi Sulawesi (Sumber Profil Propinsi Sumatera Selatan terbitan Kementerian Penerangan 1953)**

Nominal gaji yang diterima buruh lelaki lebih besar dibanding buruh perempuan. Alasan di balik fenomena ini ialah perempuan memilih pekerjaan paruh waktu, pekerjaan yang lebih ringan dibanding lelaki atau pekerjaan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan rumah tangga. Pekerjaan paruh waktu banyak terdapat di industri batik. Keahlian membatik yang dimiliki pembatik belum cukup memperbaiki kesejahteraan hidup (Hera, 2014: 13). Manipulasi atas kesadaran dibayar murah dilakukan secara sistemik dengan dalih sebagai

ibu rumah tangga yang sekedar mencari tambahan dan bukan nafkah utama. Industri batik yang masuk ke dalam rumah tempat tinggal pembatik juga mengandung resiko yang tidak bisa dianggap remeh. Anak-anak pembatik kehilangan sebagian besar perhatian dari orang tuanya berikut rumah sebagai tempat bermain, belajar serta beraktivitas; Limbah pengolahan zat pewarna kimia dan zat kimia untuk fiksasi yang dibuang begitu saja di lingkungan rumah para pembatik;

Beberapa penyakit yang muncul dari proses pembuatan batik mulai dari gangguan saluran pernafasan akibat limbah benang yang halus setelah pengguntingan dan menjahit kain batik hingga penyakit lainnya akibat penjahit yang selalu mengkonsumsi minuman energi untuk menambah stamina demi mengejar *setoran*. Indonesianis Jean Gelman Taylor (dalam Suryakusuma, 2004) melalui tulisannya *Costume and Gender in Colonial Java* memiliki analisis yang berbeda. “Batik itu bukan kostum dari kewarganegaraan di negara Indonesia yang merdeka-jauh dari itu. Ia merupakan pakaian seremonial kaum elit dan pakaian sehari-hari dari pekerja miskin yang jauh dari perlindungan undang-undang perburuhan dan hak-hak sipil.”

#### **KEHIDUPAN BURUH PEREMPUAN DI REPUBLIK MUDA**

Buruh perempuan diberi kesempatan bekerja untuk menyusui anaknya selama jam kerja (Kedaulatan Rakyat, 1955: 2). Hal ini dijamin UU No. 1 tahun 1951 yang mengatur pula cuti haid (selama 2 hari) dan gaji penuh kepada buruh perempuan. Kementerian Perburuhan di bawah Iskandar Tedjasukmana (2008) mempertanyakan hak buruh perempuan dengan dalih hal itu merugikan perusahaan dan membuat lesu perekonomian nasional. Sikap kementerian perburuhan menuai protes Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) melalui Biro Konsultasi Kongres Wanita Indonesia mengirim sebuah proposal yang mengemukakan sikap pemerintah terkait masalah perlindungan buruh perempuan. Tantangan buruh perempuan di industri modern mengutamakan

berbagai masalah ekonomi dan sosial. *Kepartaian di Indonesia* yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI tahun 1950 memberikan data yang cukup menarik. Di antara 14 partai yang ada saat itu hanya Partai Wanita Rakjat di bawah pimpinan Nyi Sri Mangunsarkoro saja yang memiliki program perjuangan ekonomi spesifik untuk buruh perempuan. Penyediaan koperasi buruh dengan keterlibatan buruh perempuan dalam usaha itu dan partisipasi buruh perempuan dalam proses penguasaan cabang-cabang produksi vital merupakan dua program tersebut (Kementerian Penerangan, 1950: 140).

Buruh perempuan sebagai seorang ibu yang berada di luar rumah hampir sepanjang hari dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Mereka masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Konsekuensi berikutnya ialah mengurus anak seringkali terabaikan. Wacana pendirian panti pengasuhan anak sempat mengemuka pada dekade 1950-an oleh beberapa kalangan gerakan perempuan dengan sumber pendanaan pemerintah dan swasta. Panti pengasuhan anak setidaknya akan membuat industrialisasi berjalan dengan lancar bagi buruh perempuan tanpa pengkhawatiran pengurusan anak. Beberapa taman kanak dan panti pengasuhan anak telah didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan perempuan, namun biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Bagi buruh perempuan yang tidak mampu solusi pengurusan anak ialah menyerahkan pengasuhan anak kepada Nenek atau Kakeknya ataupun sanak saudaranya, sebuah kebiasaan lama.





**Gambar 2. Beberapa perempuan menanti di luar kantor Jawatan Penempatan Kerja Propinsi Sulawesi terkait dengan pendataan dan pencarian kerja bagi mereka. (Sumber Profil Propinsi Sumatera Selatan terbitan Kementerian Penerangan 1953).**

Serikat buruh perkebunan di Sumatera berhasil membuat beberapa tempat pengasuhan anak. Penyelenggaraan penitipan anak-anak buruh untuk Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan bagian tanggung jawab jaminan sosial dan kesejahteraan buruh dari kanto penyuluh setempat (Djawatan Penerangan R. I. Daerah Istimewa Jogjakarta, 1953: 590-591) Sayangnya tempat-tempat itu tidak berjalan dengan baik dari segi fasilitas maupun administrasi. Persoalan tersebut membuat kalangan gerakan perempuan melihat optimalisasi guru melalui pelatihan adalah hal mutlak dilakukan dalam penempatan isu panti penitipan anak. Pada awal dekade 1950-an, De Steurs (2008: 255) mencatat terdapat 20 hingga 30 panti penitipan anak bagi buruh perempuan yang memiliki anak. Beberapa potret kehidupan buruh perempuan pada masa republik muda, bahkan hingga kini, membuktikan bahwa kalangan buruh perempuan masih memiliki sejumlah tantangan untuk mempengaruhi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara dalam menentukan masa depan bangsa.

## PENUTUP

“If you wish to know how civilized a culture is, look at how they treat it’s women.” –Bacha Khan.

Semenjak reformasi tahun 1998 di Indonesia, para pengkaji sejarah memiliki potensi memberi sumbangsih penting dalam mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan multikultur. Narasi yang membuka ulang pandangan publik terhadap sejarah nasional sekaligus membuka ruang kritis yang memungkinkan dialog-dialog di antara segenap pihak-pihak yang tinggal di Indonesia. Pihak-pihak tersebut termasuk buruh perempuan. Menghadirkan ruang bagi buruh perempuan dalam studi sejarah Indonesia menemukan momentum pasca reformasi. Pada ranah teoritik, kehadiran perkembangan studi feminin, post struktural, post modern, globalisasi, hingga kosmopolitan membuka peluang untuk melihat obyek buruh perempuan sebagai bagian dari gerakan buruh lebih komprehensif. Hubungan relasi perburuhan dengan buruh perempuan di dalamnya

perlu dilihat dalam dinamika di luar parik, yakni di rumah maupun komunitas tempat tinggal.

Bambang Purwanto (dalam Erman & Saptari, 2013: vii-viii) menantang beberapa dekonstruksi istilah tukang, pekerja seks komersial, dan pembantu rumah tangga dalam klasifikasi buruh sektor jasa. Dua profesi terakhir yang disebut adalah wilayah perempuan banyak bekerja. Ratna Saptari telah mendemonstrasikan dengan baik melalui narasi sejarah seputar proses dekolonisasi melalui lensa pembantu rumah tangga. Studi Saptari turut membahas persoalan-persoalan metodologis menyangkut narasi sejarah, ingatan individu, dan kolektif (Erman & Saptari, 2013: 342-381). Persoalan gender dalam identifikasi buruh menjadi perhatian ilmuwan feminis. Perbedaan gender merupakan dasar dari perbedaan antara kerja terampil maupun tidak terampil, dari diskriminasi upah, dan pengaturan undang-undang perburuhan yang berbeda-beda. Demokratisasi studi sejarah Indonesia mengenai buruh dan buruh perempuan merupakan ruang terbuka yang terus menunggu diisi dengan berbagai multi ragam sudut pandang.

## PERSANTUNAN

Tulisan ini dipersembahkan sebagai hadiah sederhana bagi mahaguru penulis, Sejarawan Universitas Negeri Malang Drs. Marsudi, M. Hum yang memasuki usia emas ke-50 tahun. Rasa syukur, hormat, terima kasih, dan doa teriring bagi seseorang yang telah menulis “*Negara Jawa Timur: Dinamika Lokal pada Masa Revolusi*” ini pada tahun 2000.

## DAFTAR RUJUKAN

Budianta, M. 2004. Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia. Dalam Taufiq Ismail dkk. (Eds.), *Horison Esai Indonesia Kitab 2*. Jakarta: Horison.

- De Stuers, C. V. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Terjemahan oleh Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas, dan Dwi Istiani. Depok: Komunitas Bambu.
- Djawatan Penerangan R. I. Daerah Istimewa Jogjakarta. 1953. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogjakarta: Kementerian Penerangan.
- Djawatan Penerangan R. I. Propinsi Sumatera Selatan. 1953. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Kementerian Penerangan.
- Erman, E. & Saptari, R. 2013. *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Terjemahan oleh Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadiz, V. R. 1994. Gerakan Buruh dalam Sejarah Politik Indonesia. *Prisma* No. 10 1994, hlm. 77-79.
- Hera, F. X. D. B. B. 2014. Batik, Alam, dan Perempuan. *SURYA*, 13 Oktober 2014 hlm. 13.
- Heryanto, V. R. 2001. Teror Negara: Ariel Heryanto tentang Politik Pendidikan dan Batuk-batuk Pagi. Dalam Baskara T. Wardaya (Ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesiadalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kedaulatan Rakyat*. 1951. Front Wanita Nasional Akan Dibentuk di Jogjakarta. Hlm. 7.
- \_\_\_\_\_. 1955. Buruh Diizinkan Kerdja 54 Djam. Hlm. 2.
- Kementerian Penerangan. 1950. *Kepartaian di Indonesia*. Jogjakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Madjid, S. A. 1953. *Perkembangan Serikat Buruh di Beberapa Negara*. Jakarta: Kebangsaan, Pustaka Rakyat.

- Tedjasukmana, I. 2008. *Watak Politik Gerakan Buruh Indonesia*. Terjemahan oleh Oey Hay Djoen. Jakarta: TURC.
- Suryakusuma, J. 2004. Kebaya Sebagai Identitas Ekspresi dan Opresi. Dalam Taufiq Ismail dkk. (Eds.), *Horison Esai Indonesia Kitab 2*. Jakarta: Horison.
- Trimurti, S. K. 1986. Sukarno Si Pria. Dalam Colin Wild dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia dan BBC Seksi Indonesia.